



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SYARIF FUADI FAUZI
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II
3. NHK : 166988

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.045.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/120 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
2. Tanah Seluas 1350 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. Tanah Seluas 3040 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/80 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
5. Tanah Seluas 1000 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 163.25 m2/84 m2 di PASER, HIBAH TANPA AKTA Rp. 155.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 128.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 18.500.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.191.500.000

**III. HUTANG**

Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.191.500.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.